

KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA: KINERJA PEMERINTAH DESA ATAUKAH DAMPAK SPASIAL?

Sonny Harry B. Harmadi
Udin Suchaini
Ardi Adji

FEBRUARI 2020

KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA: KINERJA PEMERINTAH DESA ATAUKAH DAMPAK SPASIAL?

Sonny Harry B. Harmadi¹, Udin Suchaini², Ardi Adji³

TNP2K Working Paper 52 - 2020
Februari 2020

Seri Kertas Kerja TNP2K menyajikan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan untuk mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam kertas kerja ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA.

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Saran pengutipan: Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., Adji, A. Kemajuan Pembangunan Desa: Kinerja Pemerintah Desa ataukah Dampak Spasial?. TNP2K Working Paper 52/2020. Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan laporan atau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi TNP2K (info@tnp2k.go.id). Kertas kerja ini juga tersedia di situs web TNP2K (www.tnp2k.go.id).

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Sekretariat Wakil Presiden
Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

¹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sonny_harmadi@yahoo.com

² Badan Pusat Statistik, udin@bps.go.id

³ Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, win.djeroh@gmail.com

ABSTRAK

Penggelontoran dana desa sebesar Rp257,2 triliun dalam 5 tahun belakangan ini (2015-2019) memiliki skema pembagian dana secara merata. Hal ini bisa dilihat dari 90% proporsi Dana Desa sepanjang tahun 2015 hingga 2017 terbagi rata (Kemenkeu, November 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa capaian pembangunan desa bukan semata karena adanya program Dana Desa, melainkan juga atas dasar kebijakan dari tingkat pemerintah pusat hingga desa. Melihat pembangunan desa hanya dari Dana Desa sendiri menjadi nisbi untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kinerja pembangunan desa untuk melihat apakah pembangunan desa inklusif di tingkat desa (*own effect*) atau ada dampak lain di luar desa (*neighborhood effect*), yang memengaruhi kinerja pembangunan desa. Metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah ekonometrika spasial. Pengujian dilakukan terhadap seluruh desa yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 75.436 desa berdasarkan data Podes 2018. Temuan menunjukkan pembangunan desa oleh pemerintah desa setempat tidak memberi dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan desa. Pembangunan kawasan pedesaan secara bertetangga memberi dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah di atas pemerintah desa memberi dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan desa.

Kata Kunci: *Pembangunan Desa, Efek Spasial, Dana Desa*

Latar Belakang

Pembangunan desa bukan hanya dampak dari pembagian Dana Desa. Desa merupakan sasaran dari seluruh kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa itu sendiri. Penggelontoran dana desa yang sudah lebih dari 257 triliun rupiah memiliki skema adanya alokasi dasar yang dibagi rata. Skema pembagian Dana Desa tahun 2019 memiliki formula AD:AA:AF (72:3:25), sehingga untuk melihat pembangunan hanya dari Dana Desa sendiri menjadi nisbi untuk dilakukan.

Sejak percepatan pembangunan desa mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2015, banyak desa mengalami pertumbuhan pembangunan. Salah satu tanda pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya aktivitas perekonomian di desa, contohnya ada desa yang berhasil memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) melebihi Dana Desa. Warga desa, keluarga, atau rumah tangga yang menjadi pelaku atau agen ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian sekaligus menjadi penerima manfaat dari pertumbuhan ini. Penduduk sebagai agen ekonomi berperan penting menjadi penggerak perekonomian dalam suatu wilayah (Birdsall, Kelley, & Sinding, 2001). Pergerakannya memiliki dampak pada perekonomian rumah tangga (Rosenzweig, 2002). Namun, pergerakan perekonomian itu perlu ditopang infrastruktur dalam suatu wilayah.

Sekarang, paradigma pembangunan desa telah berubah dan pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan mulai dari wilayah administrasi terendah. Pemberdayaan warga dalam program padat karya dikuatkan melalui institusi pemerintah desa (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, 2016). Peningkatan anggaran untuk pembangunan desa melalui Dana Desa menjadi harapan baru dalam pembangunan desa sekaligus menjadi stimulus perekonomian desa.

Sebagai stimulus, Dana Desa diharapkan mampu mendorong perekonomian desa untuk bergerak lebih cepat. Wujud dari percepatan ini berupa pembangunan infrastruktur untuk menyangga akses perekonomian, pemberdayaan manusia dalam bentuk padat karya untuk menstimulasi fiskal, dan kegiatan lainnya yang menunjang percepatan perekonomian. Suksesnya percepatan kemajuan perekonomian desa juga tidak lepas dari peran aktif pemerintah desa itu sendiri dalam memberdayakan warganya. Kepala Desa merupakan tokoh kunci dalam memimpin pergerakan perekonomian desa. Pemerintah desa memiliki otoritas tersendiri tanpa keterlibatan pemerintah kabupaten untuk membangun desanya. Otoritas ini diimplementasikan untuk membangun dan menyusun peraturan desa (Antlöv, Village Government And Rural Development in Indonesia The New Democratic Framework, 2003).

Pengembangan infrastruktur perekonomian di tingkat lokal menjadi penopang perputaran perekonomian di desa dan wilayah sekitarnya. Keberadaan pasar, kelompok pertokoan, toko/warung kelontong menjadi gambaran perputaran perekonomian lokal di tingkat desa. Infrastruktur dapat meningkatkan kinerja dengan model interaksi infrastruktur-ekonomi dalam memprediksi distribusi peluang ekonomi di tingkat desa di suatu wilayah (Wismadi, Brussel, Zuidgeest, Sutomo, Nugroho, dan Maarseveen, 2012). Kajian terkait infrastruktur di tingkat lokal desa pernah dilaksanakan di India dengan melihat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta konektivitasnya. Hasilnya, infrastruktur perekonomian sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa bahkan memiliki dampak ke GDP (Chakraborty & Guha, 2009). Sehingga, keberadaan fasilitas infrastruktur perekonomian, seperti pasar, memiliki peran penting dalam urat nadi perekonomian di kawasan perdesaan.

Pengenalan hibah desa *lump-sum* sejak 2014 memberikan sedikit insentif untuk upaya fiskal dan pendanaan peningkatan produktivitas oleh pemerintah daerah (Dick, 2019). Melalui dana desa secara garis besar pemerintah membagi pengeluaran desa ke dalam empat pengeluaran, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan, 2017). Secara rinci, pengeluaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa melalui peran kepala desa di wilayah administrasi terendah menjadi perwakilan keinginan warga (Deggs & Miller, 2013).

Penyusunan APBDes, diserahkan kepada pemerintah desa dalam empat pengalokasian. Pertama, pengeluaran pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, pengeluaran desa untuk pembinaan masyarakat. Ketiga, pengeluaran pemerintah desa untuk pembangunan. Keempat, pengeluaran pemerintah desa untuk pemberdayaan. Namun, dalam rangka investasi, pemanfaatan Dana Desa dapat digunakan untuk penyertaan modal badan usaha milik desa (BUMDes) (Peraturan Menteri Keuangan, 2017). Pengelolaan anggaran di tingkat desa memiliki andil dalam mempercepat proses pertumbuhan ekonomi perdesaan (Alam, Ulwiya, dan Nurhidayah, 2018). Pengalokasian anggaran yang tepat dan investasi yang dilakukan pemerintah desa tak hanya menjadi motor penggerak perekonomian di desa saat ini, namun juga dapat memberikan efek limpahan pada desa-desa sekitarnya.

Pembangunan suatu desa dapat memberikan dampak bagi desa-desa sekitarnya. Salah satu contohnya adalah pasar perdesaan di Amerika Serikat pada periode 1870 hingga 1900 yang berpengaruh pada percepatan pertumbuhan perkotaan melalui substitusi produksi perkotaan untuk barang dan jasa nonpertanian (Ermisch & Weiss, 1968). Pasar menjadi penampung segala jenis produk, baik yang diproduksi di desa maupun dari luar desa. Sementara di Indonesia, pemerintah telah memfasilitasi pertumbuhan dan akses terhadap fasilitas pasar di tingkat desa sejak tahun 2015. Namun, pembangunan desa ini sangat bergantung pada peran masyarakat melalui musyawarah desa dan kemampuan perangkat desa dalam mengalokasikan anggaran di desa.

Hingga tahun 2018, kemampuan SDM pengelola pembangunan desa masih terbatas. Publikasi potensi desa 2018 memberi gambaran bahwa, masih ada 1.017 kepala desa yang tidak pernah sekolah, 907 kepala desa tidak tamat SD, 1.656 kepala desa berpendidikan SD sederajat, serta 7.545 kepala desa berpendidikan SMP atau sederajat. Selain itu, masih ada 327 sekretaris desa yang tidak pernah sekolah, 461 sekretaris desa tidak tamat SD, 1.302 sekretaris desa berpendidikan SD atau sederajat, serta 3.615 sekretaris desa berpendidikan SMP atau sederajat. Sebagai penggerak perekonomian desa kualitas SDM perangkat desa masih perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi.

Pergerakan perekonomian di tingkat desa yang dimotori oleh pemerintah desa terealisasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Guna merealisasikan BUMDes, pemerintah desa harus memiliki kemampuan mengidentifikasi sumber daya dan peluang yang tersedia di tingkat desa. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa dapat digunakan untuk penyertaan modal (BUMDes) (Peraturan Menteri Keuangan, 2017).

BUMDes berperan penting dalam otonomi desa, yaitu untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan investasi dapat dikembangkan pada unit usaha BUMDes. Keberadaan BUMDes berdampak pada usaha masyarakat di desa. BUMDes juga dapat mendorong masyarakat untuk memulai sebuah usaha baru sesuai potensi yang tersedia di desa (Caya & Rahayu, 2019). Selain BUMDes, pengelolaan anggaran di desa juga memberikan dampak terhadap pembangunan desa dan dapat dimanfaatkan oleh desa-desa sekitarnya.

Dari sisi warga, limpahan ini terasa dengan adanya migrasi sirkuler. Rumah tangga memiliki setidaknya satu migran sirkuler, dan berdasarkan jenis kelamin serta usia kepala rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dari migrasi sirkuler jangka pendek mendorong banyak rumah tangga ke kisaran pendapatan menengah

dan atas (Hetler, 1989). Manfaat hasil pembangunan desa bisa dirasakan oleh warga desa sekitarnya. Tidak hanya warga desa yang tinggal di dalam desa, tetapi juga warga dari luar desa tertarik dalam peningkatan perekonomian desa yang tengah berkembang.

Efek limpahan pembangunan desa tidak hanya dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di desa tersebut, melainkan juga oleh penduduk desa sekitarnya. Desa bukanlah objek pembangunan sepihak, sehingga perkembangannya pun tak lepas dari pembangunan wilayah sekitarnya. Tahun 1968, penelitian mengenai pembangunan desa-kota memiliki kaitan yang erat dengan ukuran populasi penduduk serta keputusan kewirausahaan. Keduanya menjadi kunci untuk proses pertumbuhan di tingkat lokal (Hart, Salisbury, & Smith, 1968).

Di sisi lain, secara teoretis dampak otonomi anggaran desa terhadap pembangunan desa belum dapat dibuktikan. Hal ini dikarenakan pembangunan desa telah memberikan keyakinan bahwa jika desa dapat mengelola anggaran dengan baik akan berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi ini membuka wacana kajian, apakah pembangunan desa disebabkan oleh pembangunan inklusif di tingkat desa atau oleh hal lain di luar desa yang memengaruhi kinerja pembangunan desa.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah kontribusi penting untuk literatur dan kebijakan. Pertama, kajian ini melihat lokasi pemusatan pembangunan desa dalam bentuk klusterisasi spasial karena kinerja pembangunan desa tidak terlepas dari desa-desa sekitarnya. Oleh karenanya, diperlukan bukti empiris bahwa perkembangan pembangunan desa secara signifikan juga dipengaruhi oleh limpahan (*spillover effect*) pembangunan desa sekitarnya. Kedua, untuk mendapatkan bukti empiris tersebut, penelitian ini mengkaji dampak pembangunan kawasan perdesaan. Ketiga, secara simultan penelitian ini mengkaji kinerja pemerintah desa sebagai cerminan motor penggerak pembangunan desa melalui pengalokasian anggaran APBDes, SDM di tingkat desa, serta investasi unit usaha BUMDes. Keempat, penelitian ini mengkaji kemampuan kepemimpinan kepala desa beserta perangkatnya dalam menunaikan pembangunan desa.

Selanjutnya kajian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu kerangka kerja teoretis yang dilanjutkan dengan menjabarkan rangkaian data utama yang digunakan. Bagian berikutnya menjelaskan pembangunan desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Selanjutnya adalah bagian utama yaitu hasil penelitian, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan.

Kerangka Kerja Teoretis

Kajian ini mengulas tentang peran penting pemerintah desa dalam pembangunan desa. Hal yang diulas pertama adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pendidikan kepala desa, sekretaris desa, dan aparatnya. Ketiga, investasi di bidang usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga domain ini tumbuh dari dalam desa.

Pengalokasian anggaran dana desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan, 2017). Pembagiannya diatur dalam pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kepemimpinan di desa, mulai dari kepala desa hingga perangkatnya merupakan amanah dari undang-undang (Undang-Undang No. 6, 2014). Kekhawatiran utama yang diangkat adalah tentang kapasitas desa untuk mengelola peningkatan dana (Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan, Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, 2016). Jika pemerintahan desa tidak memiliki kapasitas membangun desa dengan baik, akan menurunkan kualitas pembangunan desa itu sendiri.

Investasi di tingkat desa juga dimotori oleh pemerintah desa itu sendiri. Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes itu sendiri menjadi prasyarat pencairan Dana Desa. Namun, hal ini membuka peluang pertumbuhan BUMDes menjadi tidak efektif karena hanya sebagai syarat pencairan anggaran.

Di sisi lain, pembangunan dengan parameter yang sama untuk wilayah desa yang saling bertetangga juga dievaluasi keterkaitannya, supaya mampu menunjukkan efek limpahan dari masing-masing wilayah. Variabel yang diprediksi pada penelitian ini adalah hasil pembangunan desa yang dicerminkan oleh nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD).

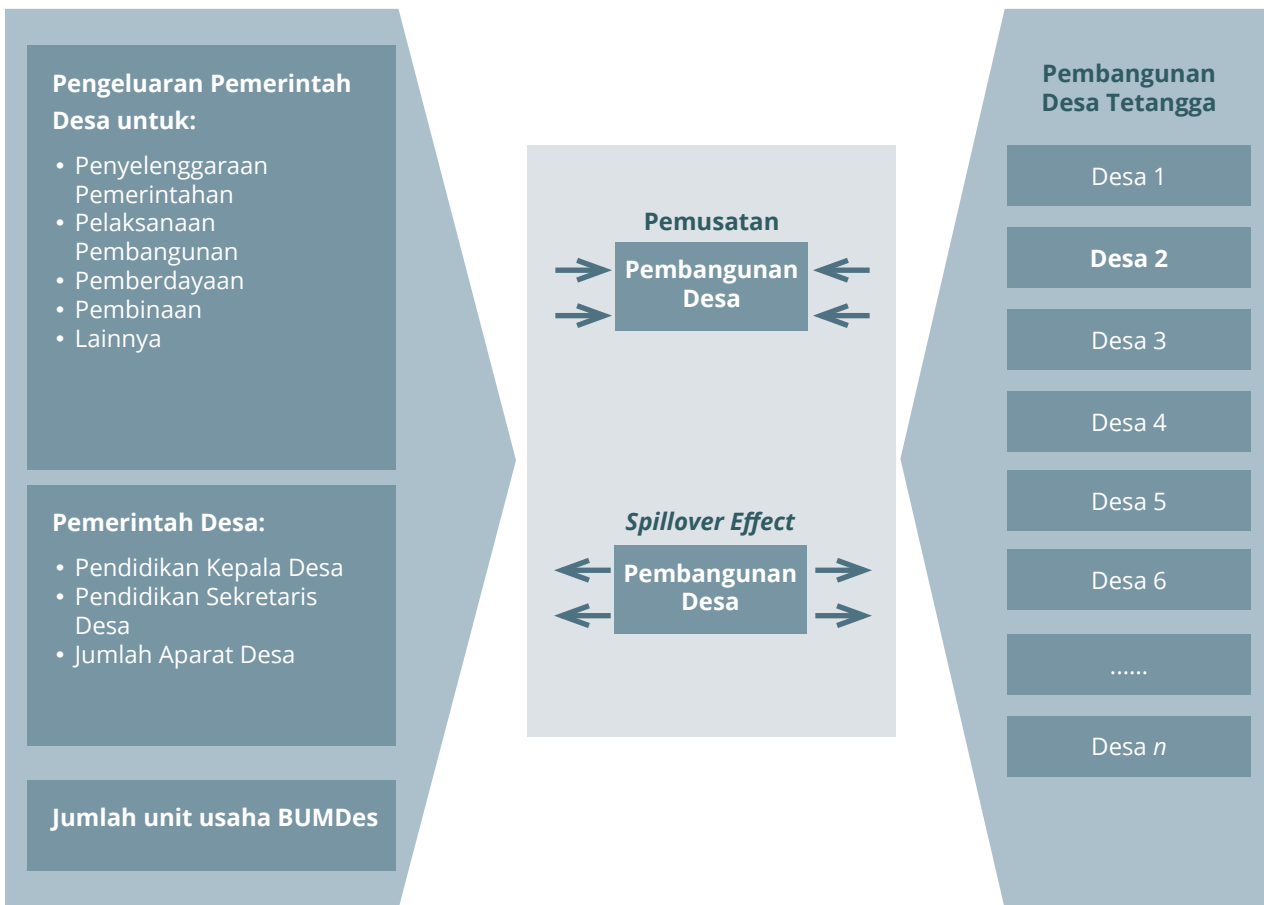
Tabel 1. Variabel Penelitian

Notasi	Variabel	Sumber Peraturan/Publikasi/Penelitian
Y	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks Pembangunan Desa 2018 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018)
X1	Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan	Pengeluaran desa dari laporan penggunaan dana desa (Peraturan Menteri Keuangan, 2017). Manfaat Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Perdesaan (Alam, Ulwiya, dan Nurhidayah, 2018).
X2	Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan	
X3	Pengeluaran desa untuk pemberdayaan	
X4	Pengeluaran desa untuk pembinaan	
X5	Pengeluaran desa untuk lainnya	
X6	Pendidikan tertinggi Kepala Desa	Kepemimpinan di desa, kepala desa dan perangkatnya merupakan amanah dari undang-undang (Undang-Undang No. 6, 2014). Kekhawatiran utama yang diangkat adalah tentang kapasitas desa untuk mengelola peningkatan dana (Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan, Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, 2016).
X7	Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa	
X8	Jumlah aparat desa	
X9	Jumlah unit usaha badan usaha milik desa (BUMDesa)	Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Caya & Rahayu, 2019)

Sumber: diolah tim TNP2K

Gambaran umum hubungan antar-variabel pada penelitian ini disadur dari penelitian terdahulu tentang aglomerasi industri kecil dan mikro yang mengalami pemusatan secara berkelompok, sekaligus melihat dampak spasial dari wilayah sekitarnya (Suchaini & Lupiyoadi, 2013).

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Diolah dari Wismadi, et al. (2012). Effect of neighbouring village conditions and infrastructure interdependency on economic opportunity: A case study of the Yogyakarta region, Indonesia. Suchaini & Lupiyoadi. (2013). Karakteristik Lingkungan Usaha Pada Aglomerasi Lokasi Industri/Usaha Kecil dan Mikro di Jawa Tengah.

Sumber Data

Pada kajian ini, sumber data yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) 2018. Data Potensi Desa (Podes) berisi seluruh data kewilayahan administrasi terendah di Indonesia, yaitu desa/kelurahan. Data ini diperoleh dari kegiatan pendataan di seluruh desa, kelurahan, UPT/SPT. Data Podes merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS sebagai kerangka sensus, yaitu data dasar persiapan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Khusus untuk wilayah administrasi desa, data Podes memiliki informasi yang cukup komprehensif.

Salah satu masalah utama ketika mengevaluasi pembangunan di tingkat desa adalah ketimpangan antar-wilayah yang berdampak pada ketidaknormalan data dan *outlier* hasil pembangunan. Sehingga, sebelum proses pengolahan data dilakukan diperlukan data *cleansing* untuk menghilangkan *outlier* dari data yang ada.

Meskipun demikian, data Podes dapat kami jadikan rujukan sebagai sumber data hasil sensus seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa. Informasi yang kami gunakan dari sumber data ini adalah jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah fasilitas perekonomian (pasar, kelompok pertokoan, minimarket, dan toko kelontong), unit usaha pada badan usaha milik desa (BUMDes), serta pengeluaran pemerintah desa untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, serta penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. Sumber Data Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Unit pengukuran untuk model	Sumber Data	Konversi Data
Eksogen	Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan	Juta rupiah per desa	PODES code 1402a	Persentase dengan Logaritme Natural
	Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan	Juta rupiah per desa	PODES code 1402b	Persentase dengan Logaritme Natural
	Pengeluaran desa untuk pemberdayaan	Juta rupiah per desa	PODES code 1402c	Persentase dengan Logaritme Natural
	Pengeluaran desa untuk pembinaan	Juta rupiah per desa	PODES code 1402d	Persentase dengan Logaritme Natural
	Pengeluaran desa untuk lainnya	Juta rupiah per desa	PODES code 1402e	Persentase dengan Logaritme Natural
	Pendidikan tertinggi Kepala Desa	Juta rupiah per desa	PODES code 1701a	Data asli skala 1 – 9
	Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa	Tingkat Pendidikan	PODES code 1701b	Data asli skala 1 – 9
	Jumlah aparat desa	Tingkat Pendidikan	PODES code 1702	Data asli skala 1 – 100
	Jumlah unit usaha BUMDes	Orang /Unit	PODES code 1404a	Data asli skala 1 – 9
Endogen	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks skala 0-100	Indeks Pembangunan Desa	Data asli skala 0-100

Sumber: diolah tim TNP2K

Pembangunan Desa

Pengukuran pembangunan desa dengan IPD dilaksanakan dua kali, yaitu pada saat perencanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pengukuran dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengukur desa-desa yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2015. Untuk data desa yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Hasil IPD tahun 2015 tertuang dalam buku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2014 “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa” yang diterbitkan pada tahun yang sama, dan merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahap evaluasi, IPD dihitung kembali pada tahun 2018. Penghitungan IPD tahun 2018 menggunakan daftar dan data desa hasil Pendataan Potensi Desa 2018. Hasil dari penghitungan tersebut disajikan dalam buku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2018 yang disusun oleh BPS. Buku ini memberikan ulasan hasil pembangunan desa melalui IPD di setiap desa, provinsi, dan wilayah pulau besar. IPD merangkum hasil pembangunan desa yang beragam sesuai dengan kebutuhan lokalitas masing-masing desa.

Pada kajian ini, hasil pembangunan desa digunakan sebagai variabel *endogen*, dampak dari kinerja pemerintah desa. Pendekatannya menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas berbagai pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Pembangunan desa pada tahun 2018 telah memberikan gambaran desa dengan status tertinggal, berkembang, dan mandiri. Hasil pengkategorian IPD menghasilkan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).

Dimensi pembangunan desa mengalami peningkatan pada tahun 2018, bila dibandingkan dengan tahun 2014. Lima dimensi tersebut adalah Dimensi Pelayanan Dasar, Dimensi Kondisi Infrastruktur, Dimensi Transportasi, Dimensi Pelayanan Umum, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu sebesar 9,81 poin. Selain itu, dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu sebesar 0,92 poin. Desa Tertinggal telah berkurang sebesar 6.518 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Mandiri meningkat sebesar 2.665 desa (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).

Peningkatan pembangunan desa yang tergambar dalam IPD cukup bervariasi. Salah satu indikator yang mengalami kenaikan tinggi pada Dimensi Pelayanan Dasar adalah Ketersediaan dan Akses ke SMU Sederajat, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada SMU sederajat. Selanjutnya, pada Dimensi Kondisi Infrastruktur, indikator yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Bahan Bakar untuk Memasak yang ditandai dengan meningkatnya jumlah desa yang ada pangkalan/agen/penjual LPG.

Metode Analisis

Pada kajian ini, telaah terhadap data dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, menyusun variabel dan proses pembersihan data *outlier*. Kedua, pengujian spesifikasi terhadap model yang disusun melalui beberapa persamaan yang terbagi dalam tipologi wilayah pembangunan desa. Pengujian ini menilai secara simultan variabel kinerja pemerintah desa, di antaranya pengalokasian anggaran pemerintah desa, SDM perangkat desa, serta investasi unit usaha BUMDes di tingkat desa. Ketiga, menguji pengaruh pembangunan kawasan perdesaan yang dibatasi oleh wilayah desa yang saling bertetangga.

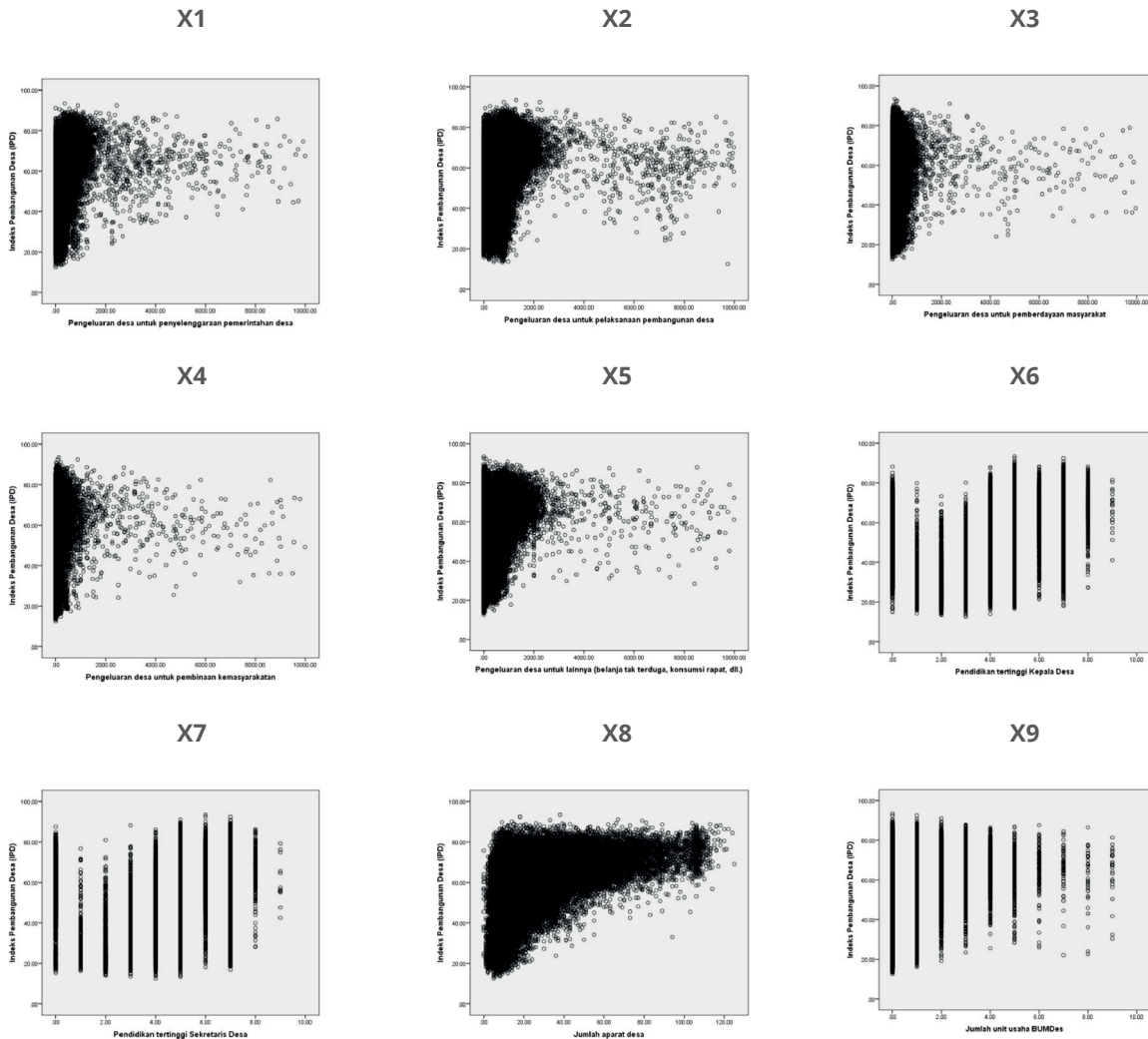
Pada kajian ini, pengujian dilakukan dengan uji pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Jenis variabel eksogen yang digunakan adalah aktivitas perekonomian di desa, pelaku usaha dan konsumen di tingkat desa, dan investasi desa terhadap usaha. Variabel jenis pertama dapat dilihat dari banyaknya kelompok pertokoan, pasar, *minimarket*, serta toko kelontong di tingkat desa, sedangkan variabel jenis kedua dilihat dari jumlah penduduk dan keluarga yang ada di desa. Selain itu, jenis variabel eksogen yang ketiga dilihat dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengeluaran pemerintah desa untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, variabel endogen yang digunakan adalah capaian pembangunan desa yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Unit analisis pada kajian ini adalah desa, yaitu wilayah administrasi terendah di Indonesia yang menjadi subjek pembangunan di tingkat desa. Desa yang dievaluasi adalah desa di seluruh wilayah Indonesia, sebanyak 75.436 desa.

Data Cleansing

Pada bagian ini peneliti menunjukkan sebaran data yang digunakan untuk melakukan analisis. Tujuannya adalah untuk melihat *outlier* data yang mungkin dapat mengganggu penghitungan. Data tersebut dibuat dengan Teknik *scatter plot*, yang hasilnya sebagai berikut:

Gambar 2 Scatter Plot Data Asli



Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Keterangan: X merupakan variabel eksogen dan Y merupakan variabel endogen

Dari *scatter plot* tersebut terlihat bahwa hampir semua variabel mengalami *outlier* data. Data *outlier* terjadi pada nilai tertinggi, sehingga data yang *outlier* tersebut dimasukkan dengan cara mengeluarkan *outlier* atau mengganti angka *outlier* dengan nilai tertinggi.

Spatial Autocorelation

Pada pengujian ini dilakukan pengelompokkan atau *clustering* wilayah pembangunan desa. Pengujiannya dilakukan pada hubungan interdependensi antar-wilayah dinyatakan dalam kerangka matriks bobot auto-korelasi spasial. Setiap susunan struktural yang menghubungkan unit sampel N dapat direpresentasikan sebagai matriks $N \times N$ (Malcolm & E, 2008). Pada kajian ini, matriks bobot digunakan pada wilayah yang bersinggungan langsung secara geografis. Data yang digunakan adalah data IPD 2018. Hasilnya, digunakan untuk melihat wilayah mana saja yang mengalami pemusatan pembangunan desa yang signifikan.

Korelasi Pearson's secara satuan mengikuti persamaan:

$$r(x, y) = \frac{[\sum_i (x_i - x_m)(y_i - y_m)]/N}{[\sqrt{\sum_i (x_i - x_m)^2/N}][\sqrt{\sum_i (y_i - y_m)^2/N}]}$$

Sementara itu, auto-korelasi spasial pada kajian ini menggunakan turunan korelasi Pearson yang melibatkan tetangga wilayah. Sehingga diperoleh persamaan:

$$\frac{[\sum_{ij} w_{ij}(y_i - y_m)(y_j - y_m)]/S}{[\sum_i (y_i - y_m)^2/N]} = \frac{N}{S} \frac{[\sum_{ij} w_{ij}(y_i - y_m)(y_j - y_m)]}{\sum_i (y_i - y_m)^2}$$

(Malcolm & E, 2008)

Dampak Prediktor

Own Effect

Pengujian ini dilakukan untuk mencari tahu berapa besar dampak dari kebijakan dan perekonomian di dalam desa terhadap hasil pembangunan desa. Pengujian dilakukan langsung pada variabel eksogen yang ada di desa terhadap dampak pembangunan desa yang diukur oleh pemerintah. Uji pengaruh pada bagian ini digambarkan oleh persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y = Indeks Pembangunan Desa (IPD)
- X1 = Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan
- X2 = Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan
- X3 = Pengeluaran desa untuk pemberdayaan
- X4 = Pengeluaran desa untuk pembinaan
- X5 = Pengeluaran desa untuk lainnya
- X6 = Pendidikan tertinggi Kepala Desa
- X7 = Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa
- X8 = Jumlah aparat desa
- X9 = Jumlah unit usaha BUMDes

Neighborhood Effect

Pada pengujian ini dilakukan uji pengaruh beberapa variabel X terhadap Y yang terjadi di dalam desa dengan melibatkan desa tetangganya. Pengujian langsung pada variabel eksogen yang ada di desa terhadap dampak pembangunan desa yang diukur oleh pemerintah (Suchaini & Lupiyoadi, 2013). Sementara itu, untuk melihat hubungan antar-wilayah pengujian menggunakan model *autocovariate*. Model ini dipakai untuk melihat auto-korelasi spasial dengan memperkirakan seberapa banyak variabel respons di satu lokasi yang mencerminkan nilai respons di lokasi sekitarnya. *Autocovariate* dimaksudkan untuk menangkap auto-korelasi spasial yang berasal dari proses endogen seperti hubungan antarindividu (Dormann, et al., 2007). *Autocovariate* ini ditambahkan untuk mengubah prediktor linier dari model bentuk biasanya:

$$Y = \beta X + \varepsilon \quad \dots \text{equation 1}$$

Menjadi:

$$Y = \beta X + \rho A + \varepsilon \quad \dots \text{equation 2}$$

dimana:

β = vector dari intercept dan koefisien yang menjelaskan variabel X

ρ = koefisien dari *autocovariate* A

Sementara, *autocovariate* dari lingkungan observasi (*neighborhood*) dijelaskan oleh:

$$A_i = \sum_{j \in \text{neki}} w_{ij} y_j \quad \dots \text{equation 3}$$

Secara simultan variabel prediktor dijelaskan melalui hubungannya dengan model Spatial Auto Regressif (SAR). Model SAR pertama mengasumsikan bahwa proses autoregresif hanya terjadi pada variabel respons atau variabel yang diprediksi (Y). Dengan demikian termasuk istilah (ρW) untuk autokorelasi spasial dalam variabel respons Y, tetapi juga istilah standar untuk prediktor dan kesalahan ($\beta X + \varepsilon$) seperti yang digunakan dalam regresi Ordinary Least Squares (OLS). Auto-korelasi spasial dalam respons dapat terjadi, dan biasanya mengarah ke efek spasial terarah. Oleh karena itu, dari persamaan 2 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta X + \rho A + \varepsilon$$

$$Y = \beta X + \rho WY + \varepsilon$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_7 X_7 + \varepsilon \quad \dots \text{equation 4}$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_7 X_7 + \rho WY + \varepsilon \quad \dots \text{equation 5}$$

Hasil Kajian

Analisis Deskriptif

Pada kajian ini dilakukan data *cleansing*, supaya dampak dari analisis tidak terpengaruh oleh data outlier. Tujuan data *cleansing* ini lebih untuk menghilangkan data *outlier* dan menyamakan skala, namun tidak mengubah pola distribusi data. Skala yang digunakan adalah skala 0-10. Penyesuaian ini untuk memudahkan interpretasi dan pengambilan kebijakan terkait variabel prediktor.

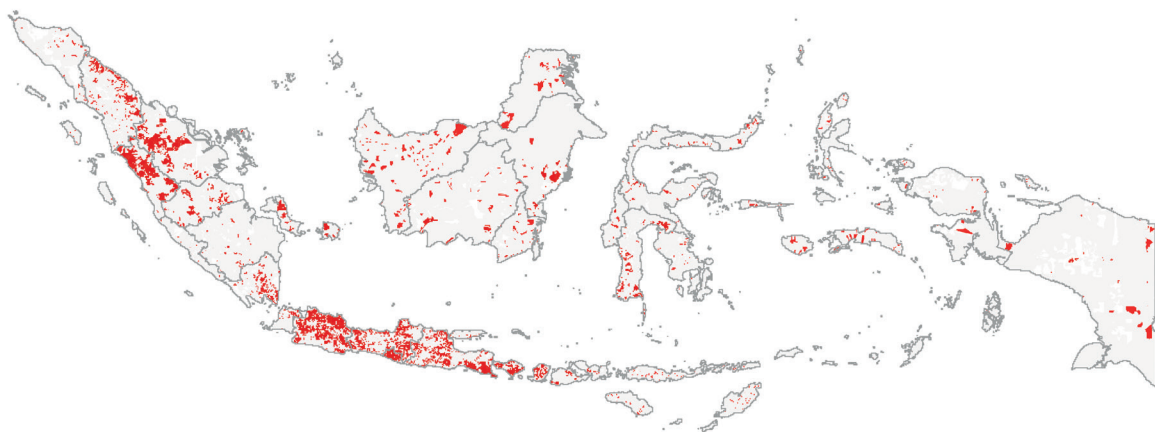
Tabel 3. Deskripsi Data

Jenis Variabel	Variabel	Min	Mean	Maks	Deviasi Standar
Y	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	12,54	59,36	93,37	13,04
X1	Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa	0,00	5,54	9,21	1,29
X2	Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan desa	0,00	6,19	9,21	1,36
X3	Pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat	0,00	4,13	9,21	1,45
X4	Pengeluaran desa untuk pembinaan kemasyarakatan	0,00	3,32	9,21	1,72
X5	Pengeluaran desa untuk lainnya (belanja tak terduga, konsumsi rapat, dll.)	0,00	3,28	9,21	2,88
X6	Pendidikan tertinggi Kepala Desa	0,00	4,96	9,00	1,53
X7	Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa	0,00	5,17	9,00	1,61
X8	Jumlah aparat desa	0,00	22,09	125,00	17,87
X9	Jumlah unit usaha BUMDes	0,00	0,79	9,00	0,95

Sumber: Diolah TNP2K, 2019

Spatial Clustering

Pada bagian ini dilakukan pemusatan pembangunan desa. Pengujian dilakukan dengan auto-korelasi spasial untuk mendapatkan lokasi pemusatan pembangunan desa. Pemusatan pembangunan desa ini memiliki pola, yakni ada wilayah yang mengalami pemusatan tinggi. Hasilnya menunjukkan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Bagian barat NTB mengalami pemusatan pembangunan yang signifikan, ditandai dengan warna gelap dimana terjadi pengelompokan nilai IPD yang cukup tinggi.

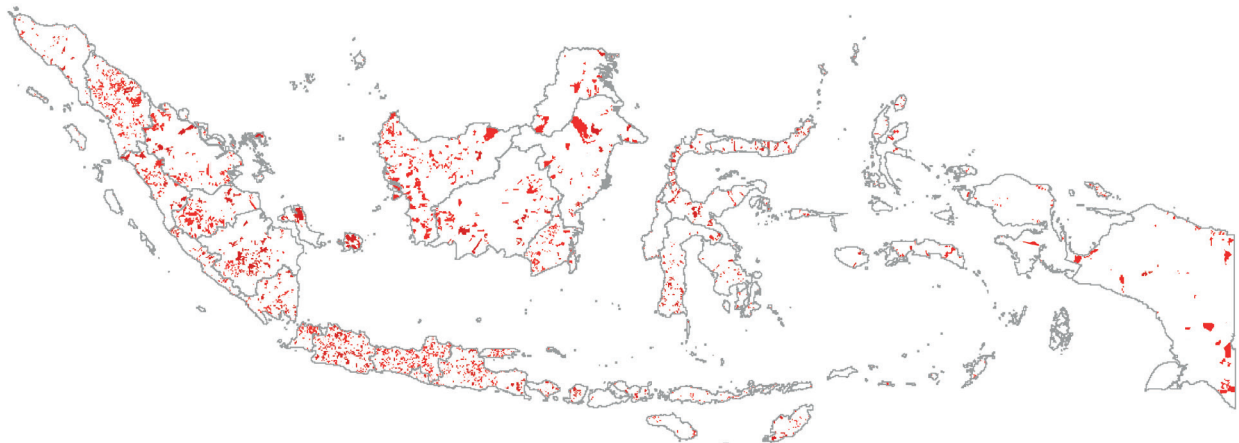
Gambar 3. Pemusatan Pembangunan Desa 2018

■ Pemusatan pembangunan desa, taraf signifikansi mencapai 5%

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018.

Pembangunan desa yang masif masih terjadi di Indonesia bagian barat. Pengelompokannya secara signifikan ditunjukkan oleh wilayah yang berwarna merah (gelap). Wilayah ini merupakan *cluster* desa yang memiliki nilai IPD tinggi dengan desa tetangga yang juga memiliki nilai IPD tinggi. Secara statistik wilayah tersebut taraf signifikansi hingga pemusatan pembangunan desa di NTT, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak terjadi secara merata. Pencilan-pencilan pembangunan desa terjadi di wilayah tertentu dan tidak merata.

Gambar 4. Pemusatan Pembangunan Desa Menurut Keberadaan BUMDes 2018

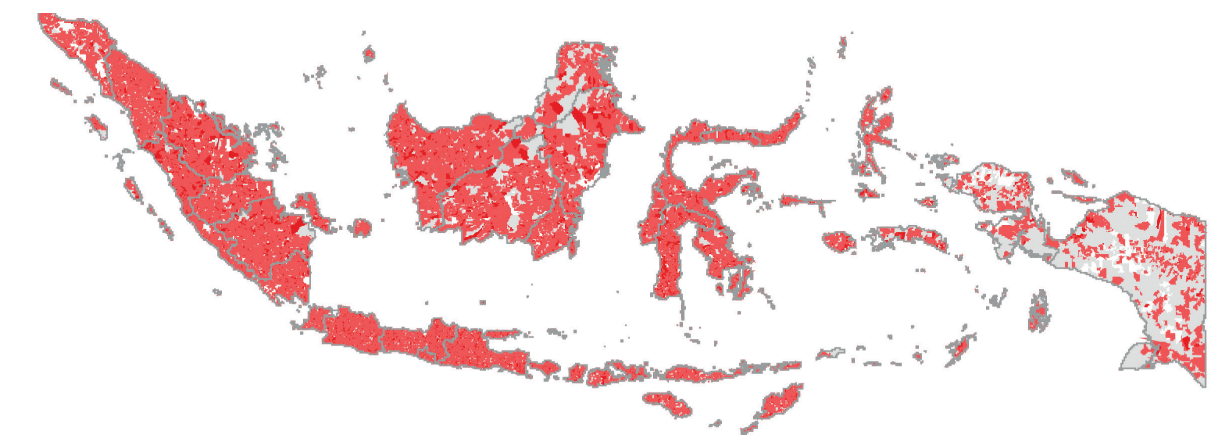


■ Pemusatan BUMDes yang berkorelasi dengan pembangunan desa Mencapai taraf signifikansi sebesar 5%

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Banyak BUMDes yang mulai tumbuh, dan pemusatannya memiliki hubungan dengan pembangunan desa. Meskipun pertumbuhan BUMDes masih fokus di wilayah Indonesia Bagian Barat, BUMDes di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua mulai berkembang. Pertumbuhan BUMDes yang signifikan ditunjukkan oleh wilayah yang berwarna merah (gelap), yaitu *cluster* desa yang memiliki BUMDes yang berhubungan dengan IPD. Secara statistik pertumbuhan BUMDes menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai 0,05 persen. Keberhasilan pembangunan desa dan BUMDes ini juga tak lepas dari kepemimpinan di desa.

Gambar 5. Sebaran Desa Menurut Keberadaan Pendidikan Kepala Desa 2018

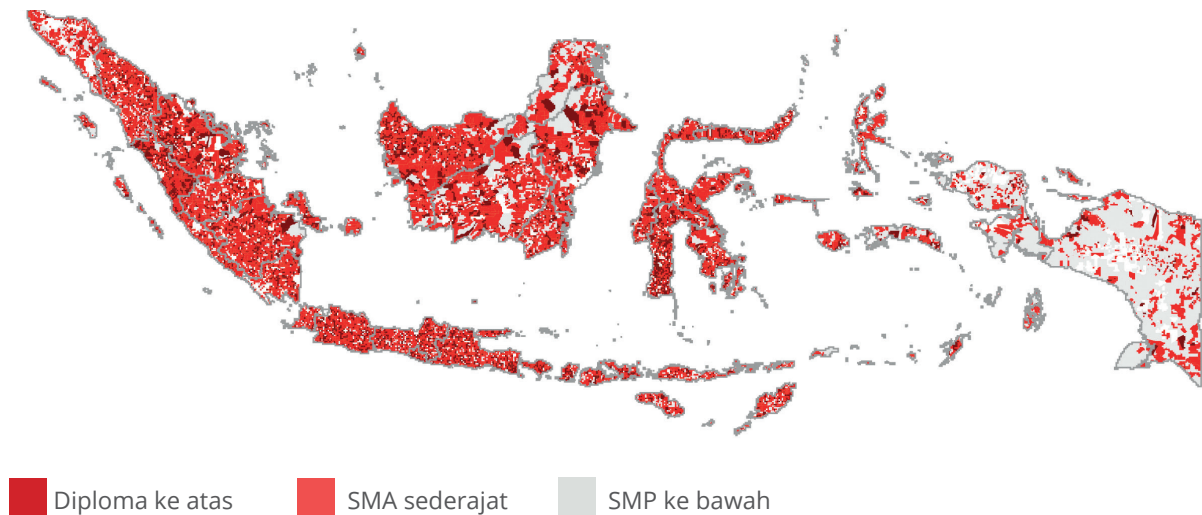


■ Diploma ke atas ■ SMA sederajat ■ SMP ke bawah

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Sebagian besar kepala desa di Indonesia memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMA. Tercermin dari gambar 5, sebaran desa berdasarkan tingkat pendidikan kepala desa hampir merata di seluruh Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat. Hal ini konsisten dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mensyaratkan minimal pendidikan kepala desa adalah SMA. Desa-desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa pun telah memberlakukan aturan ini. Dalam menunaikan tugas membangun desa, seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris desa.

Gambar 6. Sebaran Desa Menurut Keberadaan Pendidikan Sekretaris Desa 2018



Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Sebagian besar sekretaris desa di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan SMA. Tercermin dari gambar 6, sebaran desa berdasarkan pendidikan sekretaris desa merata di seluruh Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat. Sekretaris desa berperan penting dalam membantu kepala desa dalam pembangunan desa. Mulai dalam urusan administratif hingga pelaksanaan pencairan Dana Desa.

Diagnostik OLS

OLS pada bagian ini untuk mengetahui pola perilaku pembangunan desa dari data. Perilaku pembangunan desa dalam tipologi desa yang berbeda menjadi gambaran kondisi lapangan. Analisis OLS digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah sesuai dengan realita yang tengah terjadi dalam progres pembangunan desa.

Bagian ini menilai perilaku data berikut menggunakan beberapa persamaan yang diuji secara simultan, kemudian membandingkan hasilnya satu sama lain. Masing-masing persamaan digunakan untuk melihat konsistensi dari pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Setiap persamaan juga dibedakan menurut tipologi desa, yakni status perdesaan-perkotaan, tepi laut-bukan tepi laut, dan tepi sekitar kawasan hutan-di luar kawasan hutan.

Dengan pemodelan regresi, menghasilkan model yang konsisten. Dari enam model yang dilakukan menurut tipologi desa, hanya satu yang memiliki pola berbeda, yaitu desa yang memiliki tipologi perkotaan. Sementara itu, model dengan tipologi lainnya, perdesaan, tepi laut, dan kawasan hutan memiliki pola yang sama. Desa dengan tipologi perkotaan memiliki infrastruktur pelayanan dasar yang relatif lengkap jika dibandingkan dengan desa yang berstatus perdesaan.

Tabel 4. Koefisien OLS Menurut Tipologi Desa

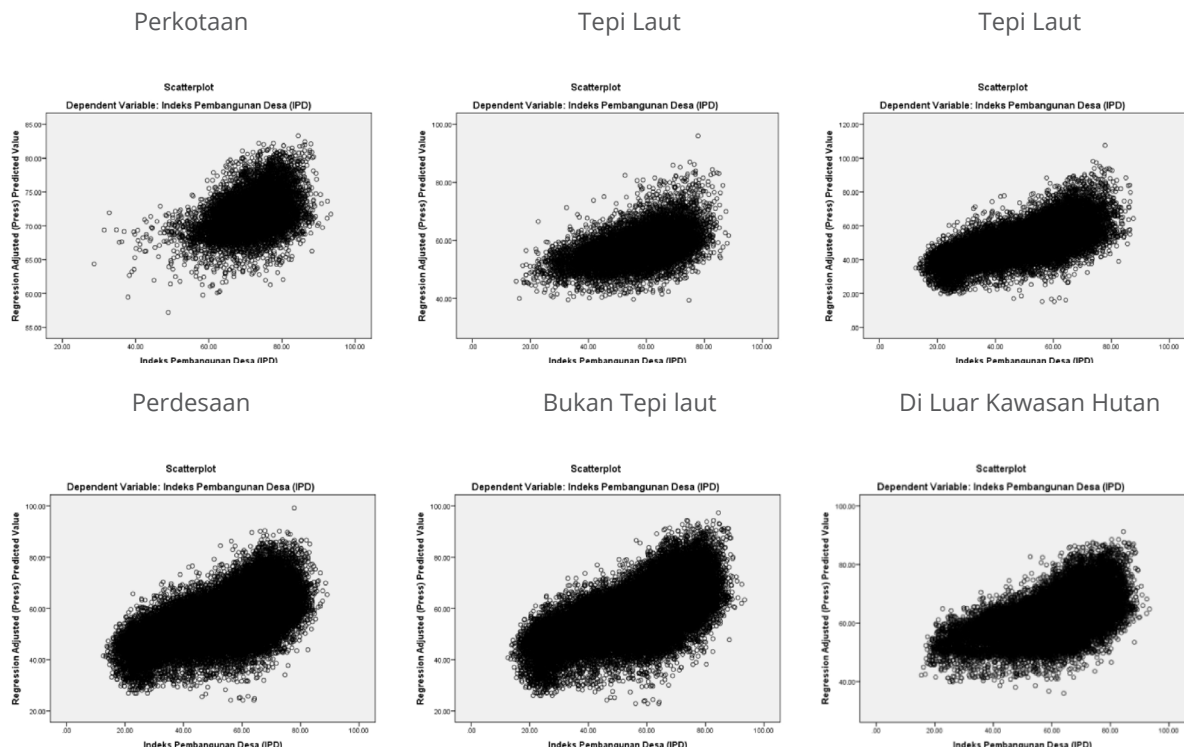
Model	Parameter	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9
Perkotaan	R ² :0,165 P-Val: 0,000 SE:6,642 N: 9.774	56.618 (+)*	0.795 (+)*	0.054 (+)	0.018 (+)**	0.201 (+)	0.000 (+)	0.633 (+)*	0.443 (+)*	0.084 (+)*	0.351 (+)*
Perdesaan	R ² :0,345 P-Val: 0,000 SE:10,279 N: 65.662	24.192 (+)*	1.239 (+)*	0.581 (+)*	-0.305 (-)*	0.428 (+)*	0.284 (+)*	1.936 (+)*	1.259 (+)*	0.220 (+)*	2.049 (+)*
Tepi Laut	R ² :0,240 P-Val: 0,000 SE:10,22479 N: 11.385	33.17 (+)*	0.781 (+)*	0.151 (+)	-0.204 (-)*	0.216 (+)*	0.342 (+)*	1.009 (+)*	1.517 (+)*	0.217 (+)*	2.014 (+)*
Bukan Tepi Laut	R ² :0,385 P-Val: 0,000 SE:10,378 N: 64.051	22.904 (+)*	1.526 (+)*	0.613 (+)*	-0.265 (-)*	0.480 (+)*	0.247 (+)*	2.175 (+)*	1.143 (+)*	0.217 (+)*	1.870 (+)*
Sekitar Kawasan Hutan	R ² :0,447 P-Val: 0,000 SE:11,261 N: 20.682	15.265 (+)*	1.067 (+)*	0.592 (+)*	-0.171 (-)*	0.568 (+)*	0.367 (+)*	2.118 (+)*	1.613 (+)*	0.299 (+)*	2.71 (+)*
Di Luar Kawasan Hutan	R ² :0,276 P-Val: 0,000 SE:9,117 N: 54.754	36.059 (+)*	1.105 (+)*	0.285 (+)*	-0.138 (-)*	0.332 (+)*	0.171 (+)*	1.461 (+)*	0.815 (+)*	0.185 (+)*	1.238 (+)*

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

R²: R-Squared, SE: *Standard Error of Estimation*, β_0 = *Intercept coefficient*, β_1 :Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, β_2 : Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan, β_3 : Pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat, β_4 : Pengeluaran desa untuk pembinaan kemasyarakatan, β_5 : Pengeluaran desa untuk lainnya (belanja tak terduga, konsumsi rapat, dll.), β_6 : Pendidikan tertinggi Kepala Desa, β_7 : Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa, β_8 : Jumlah aparat desa, β_9 : Jumlah unit usaha BUMDes.

Gambar 7. Scatter Plot Y dengan Y Prediksi Menurut Tipologi Desa



Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Keterangan: X merupakan variabel endogen, Y merupakan Prediktor

Hasil dari diagnosis OLS ini menunjukkan hanya satu variabel yang berdampak negatif dengan pembangunan desa. Variabel yang berdampak negatif ini adalah pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, tujuh variabel lainnya memiliki dampak positif terhadap pembangunan desa. Model ini memiliki hasil yang konsisten sebagaimana dipertegas oleh scatter plot antara nilai Y dengan hasil nilai Y yang diprediksikan. Hanya satu persamaan yang tidak menggambarkan pola tertentu, yaitu persamaan model pertama. Persamaan model ini terdapat di desa yang memiliki status perkotaan.

Desa Dengan Status Perkotaan

Desa dengan ciri perkotaan memiliki pola yang paling berbeda dari desa pada umumnya. Perilaku ini tercermin dari adanya kelurahan yang memiliki ciri kota, namun berubah status menjadi desa. Desa dengan status perkotaan memiliki perbedaan bentuk pembangunan desa, pemberdayaan pemerintahan, dan pengeluaran desa dalam bentuk lain yang tidak signifikan. Di desa seperti ini pemerintah mengeluarkan dana untuk pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang biasanya memberikan hasil cukup signifikan. Selain itu, Kepala Desa memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekretaris desa, serta jumlah aparat desanya lebih banyak. Desa dengan kategori perkotaan ini juga memiliki BUMDes yang berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan desa.

Selain perbedaan yang dijabarkan di atas, desa dengan status perkotaan juga memiliki infrastruktur pelayanan dasar yang relatif cukup baik. Oleh karena itu, kebijakan desa dapat dioptimalkan dengan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan pemerintah desa adalah dengan melihat tingkat pendidikan terakhir calon kepala desa dan sekretaris desa saat pemilihan demi efektivitas pelayanan dan pembinaan masyarakat desa.

Desa Dengan Status Perdesaan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di desa dengan status perdesaan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan setelah penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemberdayaan masyarakat memiliki kontribusi yang negatif terhadap pembangunan desa. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat di desa dilakukan dengan pola padat karya, namun melekat dengan pembangunan infrastruktur. Dampaknya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi satu bagian dalam pembangunan desa, padahal pembangunan infrastruktur masih diperlukan. Di sisi lain, pengeluaran desa untuk pembinaan dan lainnya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

Selain pengeluaran desa, pendidikan aparat desa berhubungan dengan pembangunan desa. Khususnya latar belakang pendidikan kepala desa akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembangunan desa jika dibandingkan dengan pendidikan sekretaris desa. Kondisi ini ditunjukkan oleh β_6 (1,936) yang lebih tinggi dari β_7 (1,259). Selain itu, peningkatan jumlah aparat desa juga memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, namun tidak setinggi pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

Dari sisi investasi perekonomian, keberadaan unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. BUMDes menjadi bagian kinerja pemerintah desa yang memiliki kontribusi tertinggi, jika dibandingkan dengan variabel pengeluaran dan SDM aparat desa.

Desa Tepi Laut

Kinerja pemerintah desa tepi laut memiliki pola yang berbeda dengan perdesaan pada umumnya. Pengeluaran pemerintah desa untuk kebutuhan lainnya, memiliki kontribusi paling tinggi jika dibandingkan dengan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Bahkan, pengeluaran untuk pembangunan desa tidak mencapai taraf signifikansi alpha 5 persen. Selain itu, pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat juga negatif.

Di samping hal-hal di atas, pendidikan sekretaris desa memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendidikan kepala desa. Kondisi ini ditunjukkan oleh β_7 (1.517) yang lebih tinggi dari β_6 (1.009). Peningkatan jumlah aparat desa, juga memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, meskipun tidak setinggi pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

Dari sisi investasi perekonomian, keberadaan unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. BUMDes menjadi bagian kinerja pemerintah desa yang memiliki kontribusi tertinggi, jika dibandingkan dengan variabel pengeluaran dan SDM aparat desa.

Desa Bukan Tepi Laut

Kinerja pemerintah desa di daerah bukan tepi laut ditunjukkan oleh pola pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kontribusi tertinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran desa untuk hal lainnya. Untuk desa dengan kategori ini pengeluaran pemerintah untuk pembangunan desa memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, namun pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat memiliki kontribusi yang negatif dan signifikan.

Selain itu, pendidikan kepala desa memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sekretaris desa. Kepala desa berperan penting dalam pembangunan desa. Kondisi ini ditunjukkan oleh β_6 (2.175) yang lebih tinggi dari β_7 (1.143). Di samping itu, peningkatan jumlah aparat desa juga memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, meski tidak setinggi pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

Dari sisi investasi perekonomian, keberadaan unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. BUMDes menjadi bagian kinerja pemerintah desa yang memiliki kontribusi tertinggi, jika dibandingkan dengan variabel pengeluaran dan SDM aparat desa.

Desa Sekitar Kawasan Hutan

Kinerja pemerintah desa di desa sekitar kawasan hutan memiliki pola yang sama, antara pembangunan desa dengan pembinaan kemasyarakatan. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi kontributor tertinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran desa untuk hal lainnya. Namun demikian, pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat memiliki kontribusi yang negatif dan signifikan.

Di luar hal yang dijabarkan di atas, kepala desa berperan penting dalam pembangunan desa. Pendidikan kepala desa memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sekretaris desa. Kondisi ini ditunjukkan oleh β_6 (2.118) yang lebih tinggi dari β_7 (1.613). Peningkatan jumlah aparat desa juga memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, meskipun tidak setinggi pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

Dari sisi investasi perekonomian, keberadaan unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. BUMDes menjadi bagian kinerja pemerintah desa yang memiliki kontribusi tertinggi, jika dibandingkan dengan variabel pengeluaran dan SDM aparat desa.

Desa Di Luar Kawasan Hutan

Kinerja pemerintah desa di luar kawasan hutan berpola pembinaan kemasyarakatan memiliki kontribusi yang lebih baik dibandingkan dengan pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan memiliki kontribusi tertinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran desa untuk hal lainnya. Namun, untuk pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat memiliki kontribusi yang negatif dan signifikan.

Selain itu, Kepala desa berperan penting dalam pembangunan desa. Pendidikan kepala desa memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sekretaris desa. Kondisi ini ditunjukkan oleh β_6 (1.461) yang lebih tinggi dari β_7 (0.815). Peningkatan jumlah aparat desa, juga memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, meskipun tidak setinggi pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

Dari sisi investasi perekonomian, keberadaan unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. BUMDes menjadi bagian kinerja pemerintah desa yang memiliki kontribusi lebih rendah jika dibandingkan dengan pendidikan kepala desa.

Predictor Effect (Dampak Prediktor)

Kajian ini menghasilkan empat persamaan yang diuji secara simultan, kemudian diperbandingkan satu sama lain. Satu persamaan lainnya digunakan untuk mengukur eror dari dampak pembangunan kewilayahan.

Tabel 5. Koefisien Hasil Regresi OLS, *Spatial Lag*, dan *Spatial Error*

Model	Parameter	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9	W_Y	λ
OLS	R ² :0,364 P-Val: 0,000 SE: 10,399 N: 75.436	24,710 (+)*	1,413 (+)*	0,548 (+)*	-0,269 (-)*	0,420 (+)*	0,264 (+)*	1,962 (+)*	1,190 (+)	0,222 (+)*	1,903 (+)*		
LAG	R ² :0,617 LI: 0,000 SE: 7,369 N: 71.494	9,405 (+)*	0,423 (+)*	0,175 (+)*	0,045 (+)**	0,215 (+)*	0,076 (+)*	0,809 (+)*	0,643 (+)*	0,099 (+)*	0,770 (+)*	0,599 (+)*	
Error	R ² : 0,659 LI: 0,000 SE: 6,957 N: 71.494	47,084 (+)*	0,279 (+)*	0,036 (+)	0,049 (+)**	0,195 (+)*	0,053 (+)*	0,594 (+)*	0,594 (+)*	0,145 (+)*	0,537 (+)*		0,750 (+)*

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Keterangan: * signifikan dengan alpa 0,01, ** signifikan dengan alpa 0,05

R²: R-Squared, SE: *Standard Error of Estimation*, β_0 = *Intercept coefficient*, β_1 :Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, β_2 : Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan, β_3 : Pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat, β_4 : Pengeluaran desa untuk pembinaan kemasyarakatan, β_5 : Pengeluaran desa untuk lainnya (belanja tak terduga, konsumsi rapat, dll.), β_6 : Pendidikan tertinggi Kepala Desa, β_7 : Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa, β_8 : Jumlah aparat desa, β_9 : Jumlah unit usaha BUMDes.

Secara umum, pembangunan kewilayahan memberikan dampak yang jauh lebih baik. Hasil dari penghitungan parameter antara parsial dan kewilayahan memiliki selisih 25,3 persen. Pada umumnya pembangunan kawasan perdesaan menghasilkan parameter yang lebih baik terhadap pembangunan desa.

Selain itu, jumlah unit usaha BUMDes memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan desa. Namun, pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat justru berdampak negatif terhadap pembangunan desa.

Pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di dalam wilayah desa, peningkatan pengeluaran pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar 1 persen akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 0,01413 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengeluaran desa untuk pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan desa memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di dalam wilayah desa, peningkatan pengeluaran pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan sebesar 1 persen akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 0,00548 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengeluaran desa untuk pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki kontribusi yang negatif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di dalam wilayah desa, peningkatan pengeluaran pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 1 persen akan menurunkan hasil pembangunan desa sebesar 0,00269 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengeluaran desa untuk pembinaan kemasyarakatan

Pengeluaran desa untuk pembinaan kemasyarakatan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di dalam wilayah desa, peningkatan pengeluaran pemerintah desa untuk pembinaan sebesar 1 persen akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 0,00420 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengeluaran desa untuk lainnya (belanja tak terduga, konsumsi rapat, dll.)

Pengeluaran desa untuk pembiayaan desa lainnya memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di dalam wilayah desa, peningkatan pengeluaran pemerintah desa untuk biaya lainnya sebesar 1 persen akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 0,00264 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pendidikan tertinggi Kepala Desa

Pendidikan Kepala Desa memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Peningkatan pendidikan kepala desa dalam 1 jenjang akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 1,962 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pendidikan tertinggi Sekretaris Desa

Pendidikan Sekretaris Desa memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Peningkatan sekretaris kepala desa dalam 1 jenjang akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 1,190 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Jumlah aparat desa

Jumlah aparat desa memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Bertambahnya 1 aparat desa akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 0,222 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Jumlah unit usaha BUMDes

Jumlah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Bertambahnya 1 unit usaha BUMDes akan meningkatkan hasil pembangunan desa sebesar 1,903 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pembangunan Desa Secara Simultan

Pembangunan desa dapat digambarkan oleh pengalokasian anggaran di desa, kondisi aparat desa, serta unit usaha BUMDes. Variabel ini secara bersama-sama memberi gambaran 36,4 persen terhadap pembangunan desa.

Pembangunan Desa Secara Spasial

Pembangunan desa secara spasial atau kewilayahan dengan melibatkan desa-desa sekitarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pembangunan desa tetangga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa tetangga memiliki pengaruh sebesar 0,599, yaitu jika desa tetangga meningkat sebesar 1 poin pembangunan desa, maka desa yang diobservasi akan mengalami peningkatan sebesar 0,599. Secara simultan, pembangunan desa memiliki pengaruh sebesar 61,7 persen. Pembangunan desa digambarkan oleh pembangunan desa tetangga, pengeluaran desa, pendidikan kepala dan sekretaris desa, serta unit usaha BUMDes yang ada di desa.

Selain itu, pembangunan desa juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa tetangganya. Efek limpahan ini bernilai positif dan signifikan sebesar 0,750, yakni jika pembangunan desa meningkat sebesar 1, desa sekitarnya akan mendapatkan dampak sebesar 0,750483, dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, pembangunan desa bukan hanya dampak dari pembangunan desa itu sendiri, tetapi juga mendapatkan efek limpahan dari pembangunan desa-desa sekitarnya.

KESIMPULAN

Kajian ini secara khusus melihat capaian pembangunan desa dari sisi perekonomian dan kinerja pemerintah desa. Hasilnya secara umum menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya dampak dari pembangunan desa itu sendiri, tetapi juga dari pembangunan desa-desa yang saling bertetangga yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa dapat digambarkan oleh kinerja pemerintah desa melalui pengalokasian anggaran di desa, kondisi aparat desa, serta unit usaha BUMDes. Variabel ini secara keseluruhan memberi kontribusi 36,4 persen terhadap pembangunan desa. Namun, di saat yang sama secara keseluruhan pembangunan desa spasial (kewilayahan) memberikan pengaruh sebesar 61,7 persen terhadap capaian pembangunan desa.

Pembangunan desa tetangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa yaitu sebesar 0,599. Artinya, jika desa tetangga meningkat sebesar 1 poin pembangunan desa, desa yang diobservasi akan mengalami peningkatan sebesar 0,599. Capaian ini menggambarkan pengaruh sebesar 61,7 persen terhadap pembangunan desa.

Di sisi lain, pembangunan desa juga berpengaruh terhadap pembangunan desa tetangganya. Efek limpahan ini bernilai positif dan signifikan sebesar 0,750, yakni jika pembangunan desa meningkat sebesar 1 poin, desa sekitarnya akan mendapatkan efek limpahan sebesar 0,750483 dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Capaian ini menggambarkan pengaruh sebesar 65,9 persen terhadap pembangunan desa. Dari data tersebut maka dapat dibuktikan bahwa pembangunan desa bukan hanya dampak dari pembangunan desa itu sendiri, tetapi juga efek limpahan dari pembangunan desa-desa sekitarnya.

Capaian prediktor pembangunan desa dapat digambarkan oleh kinerja pembangunan desa. Kinerja ini ditunjukkan dari (1) pengeluaran desa menurut kategori pengeluaran; (2) SDM perangkat desa yang digambarkan oleh pendidikan kepala desa dan sekretaris desa, serta jumlah perangkat desa; (3) pembangunan unit usaha melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). Ketiga hal tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap capaian pembangunan desa.

Hasil kajian ini dapat dijadikan fondasi referensi untuk pembuatan kebijakan. **Pertama**, diperlukan kebijakan yang berbeda untuk pembangunan desa dengan tipologi perkotaan dari kebijakan pembangunan untuk desa pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan desa dengan status perkotaan cenderung sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dan masyarakatnya memiliki pendidikan yang cukup baik. Arah kebijakan pemerintah desa lebih ke pembinaan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. **Kedua**, kebijakan pembangunan desa tepi laut lebih mengoptimalkan peran sekretaris desa jika dibandingkan dengan kepala desa. Sebagai tokoh masyarakat, kepala desa di desa pantai lebih diutamakan, sementara sekretaris desa lebih untuk menyelesaikan permasalahan teknis. Oleh karena itu, setiap kegiatan di desa tepi laut lebih dipasrahkan kepada sekretaris desa untuk menindaklanjutinya. **Ketiga**, pengeluaran pemerintah desa untuk pembangunan desa tepi laut tidak signifikan dan pemberdayaan masyarakat bernilai negatif. Justru pengeluaran desa untuk pemerintahan, pembinaan, dan pengeluaran desa lainnya yang signifikan.

Kebijakan desa untuk pembinaan untuk masyarakat desa tepi laut yang optimal menjadi lebih diutamakan. **Keempat**, pembangunan desa sekitar kawasan hutan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan. **Kelima**, secara umum pemberdayaan masyarakat desa bernilai negatif, karena konteks padat karya yang dilakukan pemerintah desa saat ini melekat pada pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menyebabkan perlunya upaya pemberdayaan masyarakat selain pembangunan infrastruktur. **Keenam**, pembangunan BUMDes akan lebih efektif jika dibuat BUMDes bersama. **Ketujuh**, melakukan kerjasama antar-desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, supaya kemajuan pembangunan desa lebih cepat dilaksanakan.

Keterbatasan Penelitian

Saat melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yakni (1) tetangga (*neighbourhood*) desa adalah wilayah desa sekitarnya yang berbatasan langsung dengan desa; (2) pengeluaran pemerintah desa sesuai aturan dibatasi dalam empat penganggaran pada tahun 2017, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat, sementara pengeluaran lainnya dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk pengeluaran lainnya; (3) Kemampuan aparat desa dibatasi oleh pendidikan kepala desa dan sekretaris desa; (4) Gambaran investasi di tingkat desa dibatasi oleh keberadaan unit usaha di badan usaha milik desa (BUMDes); dan (5) sumber data yang digunakan merupakan hasil pendataan potensi desa (Podes) 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M.S., A. Ulwiya, and M. Nurhidayah. 2018. "Manfaat Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Perdesaan." (The Benefits of Village Fund Allocations on Rural Development). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 18 (2): 193-200.

Antlöv, H. 2003. "Village Government And Rural Development in Indonesia The New Democratic Framework." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (2): 193-214.

Antlöv, H., A. Wetterberg, and L. Dharmawan. 2016. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52 (2): 161-183.

Badan Pusat Statistik (BPS) (Statistics Indonesia). 2018. *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Jakarta: Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2019/05/09/4edae4bd6c18d24b1b4273fe/ indeks-pembangunan-desa-2018.html>

Birdsall, N., A.C. Kelley, and S. Sinding. (2001). "Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World." United States: Oxford University Press.

Caya, M.FN., and E. Rahayu. 2019. "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung." (The Impact of Village-owned Businesses on Community Welfare in Aik Batu Buding Village, Belitung Regency, Bangka Belitung Province). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20: 1-12.

Chakraborty, D., and A. Guha. 2009. "Infrastructure and Economic Growth in India: Analysing the Village-level Connectivity Scenario of the States." *Journal of Infrastructure Development* 1 (1): 67-86.

Deggs, D.M., and M.T. Miller. 2013. "Community College and Community Leader Expectations of the "Village"." *Community College Journal of Research and Practice* 37 (6): 424-432.

Dick, H. 2019. "The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55 (2): 259-262.

Dormann, C.F., J.M. McPherson, M.B. Araujo, R. Bivand, J. Bolliger, G. Carl, R.G. Davies, A. Hirzel, W. Jetz, W.D. Kissling, I. Kühn, R. Ohlemüller, P.R. Peres-Neto, B. Reineking, B. Schröder, F.M. Schurr, and R. Wilson. 2007. "Methods to account for spatial autocorrelation in the analysis of species distributional data: a review." *Ecography* 30 (5): 609 - 628.

Dow, M.M. and A. Eff. 2008. "Global, Regional, and Local Network Autocorrelation in the Standard Cross-Cultural Sample." *Cross-Cultural Research* 42 (2): 148-171.

Ermisch, J., and T. Weiss. 1968. "The Impact of the Rural Market on the Growth of the Urban Workforce - United States, 1870-1900." *Explorations in Economic History* 137-153.

Foster A.D. and M.R. Rosenzweig. 2002. "Household Division And Rural Economic Growth." *The Review of Economic Studies* 69 (4): 839-869.

Gertler, P.J., M. Gonzalez-Navarro, T. Gracner, and A.D. Rothenberg. 2015. "Road Quality, Local Economic Activity, and Welfare: Evidence from Indonesia's Highways." University of California, Berkeley: 1-40.

Hart, J.F., N.E. Salisbury, and E.G. Smith. 1968. "The Dying Village and Some Notions about Urban Growth." *Journal of Economic Geography* 44 (4): 324-349.

Hetler, C.B. 1989. "The Impact of Circular Migration on a Village Economy." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 25 (1): 53-75.

Minister of Finance, Indonesia. 2017. Minister of Finance Regulation No. 225/PMK.07/2017 on Management of Transfer to Regions and Village Fund.

Suchaini, U., and R. Lupiyoadi. 2013. "Karakteristik Lingkungan Usaha Pada Aglomerasi Lokasi Industri/Usaha Kecil dan Mikro di Jawa Tengah." (Characteristics of the Business Environment on the Agglomeration of Small and Micro Businesses/Industry in Central Java.) *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* 8: 58-75.

Wismadi, A., M. Brussel, M. Zuidgeest, H. Sutomo, L.E. Nugroho, and M. van Maarseveen. 2012. "Effect of neighbouring village conditions and infrastructure interdependency on economic opportunity: A case study of the Yogyakarta region, Indonesia." *Elsevier - Computers, Environment and Urban Systems* 36 (5): 371-385.

Lampiran

Tabel 4. OLS Diagnostics Menurut Tipologi Desa

Model	Parameter	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9
Perkotaan	R ² :0,165 P-Val: 0,000 SE:6,642 N: 9.774	56.618 (0,000)	0.795 (0,000)	0.054 (0,413)	0.018 (0,741)	0.201 (0,000)	0.000 (0,984)	0.633 (0,000)	0.443 (0,000)	0.084 (0,000)	0.351 (0,000)
Perdesaan	R ² :0,345 P-val: 0,000 SE:10,279 N: 65.662	24.192 (0,000)	1.239 (0,000)	0.581 (0,000)	-0.305 (0,000)	0.428 (0,000)	0.284 (0,000)	1.936 (0,000)	1.259 (0,000)	0.220 (0,000)	2.049 (0,000)
Tepi Laut	R ² :0,240 P-Val: 0,000 SE:10,22479 N: 11.385	33.17 (0,000)	0.781 (0,000)	0.151 (0,060)	-0.204 (0,003)	0.216 (0,000)	0.342 (0,000)	1.009 (0,000)	1.517 (0,000)	0.217 (0,000)	2.014 (0,000)
Bukan Tepi Laut	R ² :0,385 P-Val: 0,000 SE:10,378 N: 64.051	22.904 (0,000)	1.526 (0,000)	0.613 (0,000)	-0.265 (0,000)	0.480 (0,000)	0.247 (0,000)	2.175 (0,000)	1.143 (0,000)	0.217 (0,000)	1.870 (0,000)
Sekitar Kawasan Hutan	R ² :0,447 P-Val: 0,000 SE:11,261 N: 20.682	15.265 (0,000)	1.067 (0,000)	0.592 (0,000)	-0.171 (0,001)	0.568 (0,000)	0.367 (0,000)	2.118 (0,000)	1.613 (0,000)	0.299 (0,000)	2.71 (0,000)
Di Luar Kawasan Hutan	R ² :0,276 P-Val: 0,000 SE:9,117 N: 54.754	36.059 (0,000)	1.105 (0,000)	0.285 (0,000)	-0.138 (0,000)	0.332 (0,000)	0.171 (0,000)	1.461 (0,000)	0.815 (0,000)	0.185 (0,000)	1.238 (0,000)

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Tabel 5. Koefisien Hasil Regresi

Model	Parameter	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9	W_Y	λ
OLS	R ² : 0,364 P-Val: 0,000 SE: 10,399 N: 75.436	24,710 (0,000)	1,413 (0,000)	0,548 (0,000)	-0,269 (0,000)	0,420 (0,000)	0,264 (0,000)	1,962 (0,000)	1,190 (0,000)	0,222 (0,000)	1,903 (0,000)		
LAG	R ² : 0,617 LI: 0,000 SE: 7,369 N: 71.494	9,405 (0,000)	0,423 (0,000)	0,175 (0,000)	0,045 (0,035)	0,215 (0,000)	0,076 (0,000)	0,809 (0,000)	0,643 (0,000)	0,099 (0,000)	0,770 (0,000)	0,599 (0,000)	
Error	R ² : 0,659 LI: 0,000 SE: 6,957 N: 71.494	47,084 (0,000)	0,279 (0,000)	0,036 (0,204)	0,049 (0,038)	0,195 (0,000)	0,053 (0,000)	0,594 (0,000)	0,594 (0,000)	0,145 (0,000)	0,537 (0,000)		0,750 (0,000)

Sumber: Diolah dari data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Sekretariat Wakil Presiden
Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

Telpon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
Email : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id

